



Lawan Hak Angket DPRD Ahok Banjir Dukungan

Titip Proyek Jadi Modus Masukkan Dana Siluman Rp12 T

JAKARTA (Pos Kota) - Dukungan terhadap Gubernur DKI Ahok dalam menghadapi Hak Angket yang diajukan DPRD terus membanjir. Seperti dilakukan ratusan warga di sela kegiatan HBKB di Bundaran HI, Minggu (1/3) pagi.

Mereka membagi-bagikan topeng wajah Ahok, menyebarkan formulir petisi, dan pembubuhan aspirasi melalui selebar kertas yang kemudian di tempel di media papan. Di sela kegiatan hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) itu ada juga spanduk besar bertulis 'Kami adalah Ahok lawan begal APBD'.

Koordinator aksi, Aditya Yogi Prabowo, mengatakan, "Kami berkumpul satu pikiran melalui sosial media @temanahok. Kami sepakat mengadakan petisi dan kegiatan ini untuk menyalurkan aspirasi mendukung Pak Ahok."

DANA SILUMAN

Seperti diketahui, ketegangan Ahok dengan DPRD DKI bermula dari proses pengesahan APBD DKI 2015. Ahok menuding ada anggaran siluman Rp12,1 triliun yang dialokasikan. Ia menyatakan ada oknum anggota DPRD DKI yang ingin 'mencuri' uang rakyat.

Ahok juga akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menginvestigasi temuan anggaran siluman. Pasalnya, ia menengarai indikasi korupsi tak hanya datang dari kalangan DPRD, tetapi juga jajaran di bawahnya.

Anggaran siluman Rp12,1 triliun terbesar digunakan untuk pengadaan UPS (uninterruptible Power

Supply) di sekolah-sekolah.

Sejak APBD 2014 anggaran pengadaan UPS paling mencolok karena memakan biaya cukup besar. Harga per unitnya dalam anggaran dibandrol hingga Rp6 miliar. Padahal, ketika dicek harga UPS tak sampai Rp200 juta. Yang lebih mengherankan lagi, pihak sekolah yang dihubungi ternyata tak pernah mengajukannya namun muncul di APBD 2015.

Pernyataan Ahok tersebut mendapat reaksi keras dari Dewan dan menggulirkan Hak Angket. Langkah politik ini didasari dari sikap Ahok yang dinilai melanggar aturan karena mengirim draft APBD DKI yang tidak sesuai dengan hasil pembahasan dengan Dewan ke Kemendagri

MODUS GELEMBUNGAN HARGA

Uchok Sky Khadafi, Direktur Centre Fot Budget Analysis (CBA) menyatakan dugaan adanya dana siluman Rp12,1 T di APBD DKI 2015 bukanlah sesuatu yang baru. Penilepan uang rakyat dilakukan dengan modus titip proyek atau penggelembungan harga.

Uchok mengungkapkan dana siluman adalah anggaran yang dialokasikan tanpa ada pembahasan antara Pemprov dan DPRD DKI.

Dapat dipastikan dana ini ada karena ada kesepakatan antara oknum legislaif maupun eksekutif. "Dana siluman ini bisa diistilahkan anggaran hasil kesepakatan di luar ruang rapatlah," ujar Uchok, Minggu (1/3).

Modus yang digunakan bukan hanya 'titip proyek' atau pembuatan program yang memang tidak dibahas sebelumnya. Namun juga melalui penggelembungan harga (mark-up) satuan barang yang akan dibelanjakan.

Peluang ini terjadi, kata Uchok, karena sampai saat ini Pemprov DKI tidak memiliki standar harga satuan barang.

Untuk mengantisipasi hal ini, Uchok menilai sistem e-budgetingpun tidaklah cukup. "Solusinya adalah transparansi. Dokumen APBD harus dibuka untuk publik. Sehingga warga yang akan mengawasi. Saya kira oknum DPRD DKI maupun Pemprov DKI akan berpikir ulang untuk nilep uang rakyat," tandasnya.

MENDAGRI HARUS TURUNTANGAN

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, didesak segera turun tangan menyelesaikan perseteruan antara Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI. Pasalnya ketegangan yang terjadi merugikan warga ibukota.

Menurut pengamat politik, Arbi Sanit, situasi politik di Jakarta yang semakin gawat dan memanas membuat kedua lembaga pemerintahan daerah ini menjadi tidak produktif. "Jika polemik ini terus berlanjut, tentu warga Jakarta yang dirugikan. Pembangunan tidak berjalan," tukas Arbi, kemarin.

Ia memandang perseteruan DPRD dengan Ahok sudah lama. Namun puncaknya terkait permasalahan draft Perda APBD DKI 2015 yang dikirimkan ke Kemdagri yang tak ada tanda tangan pimpinan DPRD. Akibatnya, hampir seluruh anggota Dewan menyatakan setuju melakukan hak angket.

Terkait pemakzulan, Arbi menilai tidak dapat dilakukan DPRD, meski melalui hak angket. Karena sistem pemerintah di Indonesia presidensial, bukan parlementer. (guruh/ak/o)